



Implementasi Asta Cita Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Mohamad Arsad Rahawarin^{1*}, Hendry Selanno¹

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*Corresponding author email: rahawarinarsad@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 15, 2025

Approved February 17, 2026

Keywords:

Asta Cita, Regional Development Policy, Local Potential

ABSTRACT

This study examines the implementation of regional development policies in Kairatu District, West Seram Regency, aligned with Asta Cita principles, evidence-based approaches, and local potential. The findings indicate that Asta Cita has been integrated into regional planning documents and translated into district programs through participatory mechanisms. Evidence-based policy implementation relies on statistical data, sectoral reports, and village-level data to ensure alignment with community needs. Local potential, particularly in agriculture, fisheries, and plantations, serves as the foundation for contextual and relevant development policies. Program implementation is supported by performance indicators and the role of district officials as mediators between regency policies and local conditions. Success is driven by governmental commitment, community participation, and institutional synergy, while constraints include limited budgets, infrastructure, human resource capacity, and social participation. The study recommends strengthening officials' capacity, improving data quality, upgrading infrastructure, and expanding community involvement to achieve more effective and sustainable development.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selaras dengan prinsip Asta Cita, berbasis bukti, dan memanfaatkan potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Asta Cita telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah dan diterjemahkan ke dalam program kecamatan melalui mekanisme partisipatif. Pendekatan berbasis bukti diterapkan dengan memanfaatkan data statistik, laporan sektoral, dan pendataan desa untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, menjadi dasar arah kebijakan sehingga pembangunan bersifat kontekstual. Pelaksanaan program didukung oleh penggunaan indikator kinerja serta peran aparaturnya sebagai mediator dan penghubung antara kebijakan kabupaten dan kondisi lokal. Keberhasilan implementasi didukung oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sinergi kelembagaan, sementara kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparaturnya, peningkatan kualitas data, perbaikan infrastruktur, dan perluasan partisipasi masyarakat agar pembangunan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2026). Implementasi Asta Cita Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 820–832. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5422>

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, Asta Cita sebagai delapan agenda strategis nasional hasil penyempurnaan Nawacita menjadi kerangka penting yang menekankan peningkatan kualitas manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan (Dwilita et al., 2025). Implementasi Asta Cita di tingkat daerah menjadi krusial karena keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah (Evinita et al., 2025). Kecamatan Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan seperti ketimpangan akses layanan publik, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi informal (Faried et al., 2025).

Integrasi Asta Cita dalam kebijakan pembangunan lokal di Kecamatan Kairatu diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dari pinggiran sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Firmanto, 2025). Prinsip peningkatan kualitas manusia dapat diterjemahkan ke dalam penguatan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih inklusif, khususnya di wilayah desa (Lestari et al., 2025). Sementara itu, semangat membangun dari pinggiran mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan wilayah pesisir dan pedesaan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat Kairatu tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama yang berperan aktif dalam proses transformasi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan (Matsuda et al., 2025).

Penerapan Asta Cita juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah daerah terhadap reformasi birokrasi dan penguatan partisipasi publik. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah (Ramompas et al., 2025). Di Kecamatan Kairatu, penguatan kapasitas aparatur serta perbaikan sistem pelayanan publik menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, perluasan ruang partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan forum-forum dialog publik mencerminkan upaya mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, di mana aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan (Sakir, 2023).

Namun demikian, pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Asta Cita belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten. Berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan sektor pertanian dan kelautan telah dilaksanakan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan (Sakir & Arni, 2023). Program pembangunan jalan penghubung antar desa, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal merupakan contoh upaya yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur dalam perencanaan dan

pengelolaan program, serta lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan (Sakir & Silawane, 2025).

Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Kairatu. Beberapa desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, sementara desa lainnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat (Salamanca Osorio, 2023). Dalam konteks geografis yang cukup menantang, kebijakan pembangunan yang tidak didukung oleh data yang akurat berpotensi menghasilkan program yang kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan (Satoto et al., 2024).

Selain itu, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan reformasi birokrasi juga belum sepenuhnya terwujud secara signifikan (D. M. Selanno et al., 2025). Masih terdapat keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan publik, kurangnya transparansi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan daerah masih membutuhkan penguatan dari sisi tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen politik yang berkelanjutan (H. Selanno et al., 2025). Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, tujuan pembangunan inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita akan sulit tercapai (Silawane et al., 2024).

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan yang dirumuskan secara normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Penerjemahan Asta Cita ke dalam kebijakan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang lebih partisipatif, berbasis potensi lokal, serta didukung oleh sistem data yang kuat dan akurat. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan di Kecamatan Kairatu menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Asta Cita telah diinternalisasi dan dijalankan secara nyata, sekaligus sebagai dasar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan pembangunan wilayah, baik di tingkat lokal maupun regional, namun masih terdapat kesenjangan kajian yang perlu diisi. Sebagian penelitian lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi lokal, sementara penelitian lainnya berfokus pada evaluasi capaian pembangunan melalui indikator daya saing daerah (Subrata et al., 2025). Pendekatan-pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan konteks sosial, kelembagaan, serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, hubungan antara potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam kerangka prioritas nasional belum banyak dikaji secara komprehensif (Wahyuni et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan langsung implementasi kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka Asta Cita melalui pendekatan berbasis bukti. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis potensi lokal, proses perencanaan kebijakan, serta capaian pembangunan dalam satu kerangka evaluasi yang utuh. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaian proses perencanaan dan pelaksanaannya dengan prinsip pembangunan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan menekankan pada implementasi kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Waisapy et al., 2025). Selain itu,

penelitian ini mengaitkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dengan prinsip membangun dari pinggiran dan peningkatan produktivitas masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan realistis mengenai tantangan serta peluang pembangunan di Kecamatan Kairatu.

Kecamatan Kairatu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh praktik baik dalam implementasi pembangunan daerah yang selaras dengan Asta Cita (Yusri & Hajar, 2025). Potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta kekayaan budaya lokal dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal, pembangunan dapat diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, peningkatan kualitas data pembangunan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif, berbasis bukti, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual, implementasi Asta Cita di Kecamatan Kairatu diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi Asta Cita dalam kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik kebijakan dan praktik pembangunan yang dijalankan, tidak hanya pada aspek yang tampak secara eksplisit, tetapi juga pada pandangan, pemikiran, dan pengalaman para aktor yang terlibat. Melalui pendekatan ini, fenomena sosial yang diteliti dapat dipahami secara holistik sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rentang waktu selama tiga bulan. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Kairatu merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan para informan yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta arsip lain digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data utama. Seluruh data dicatat melalui catatan lapangan, perekaman, serta dokumentasi visual guna menjaga keutuhan informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi implementasi Asta Cita dalam kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu. Informan penelitian ditentukan secara purposif, yaitu aparat dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Informan tersebut meliputi unsur perencana pembangunan daerah, pimpinan kecamatan, serta pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Kairatu. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait proses implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian informan mengenai implementasi Asta Cita, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pembangunan dan dinamika pelaksanaannya di lapangan. Dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah kebijakan tertulis, laporan program, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Proses penelitian dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan, dan diakhiri dengan analisis data serta penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan temuan penelitian yang kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Luaran penelitian ini berupa gambaran implementasi Asta Cita dalam kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu, rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif, serta pemetaan aktor dan pola kolaborasi lintas sektor. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian kebijakan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selaras dengan prinsip-prinsip Asta Cita dan berbasis bukti (evidence-based), serta keterkaitannya dengan potensi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asta Cita diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan melalui dokumen RPJMD dan RKPD kabupaten, kemudian diterjemahkan pada program-program kecamatan melalui Musrenbang. Pendekatan berbasis bukti digunakan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat, dengan data dari BPS, laporan sektoral, dan pendataan desa sebagai acuan. Potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dijadikan dasar arah kebijakan, sehingga pembangunan menjadi relevan dan kontekstual. Faktor pendukung keberhasilan implementasi meliputi komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, potensi sumber daya alam, dan sinergi kelembagaan, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas SDM, dan partisipasi sosial yang belum merata. Dengan demikian, pembangunan di Kairatu berjalan dengan strategi yang terukur, partisipatif, dan kontekstual, meskipun masih menghadapi tantangan operasional di lapangan.

Implementasi Prinsip-Prinsip Asta Cita dalam Kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Implementasi prinsip-prinsip Asta Cita dalam kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat dipahami sebagai proses penerapan delapan prioritas pembangunan nasional ke dalam konteks lokal melalui program, kegiatan, dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Implementasi ini mencakup upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan arah pembangunan nasional dengan potensi, permasalahan, serta prioritas pembangunan di Kecamatan Kairatu, sehingga prinsip-prinsip seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Asta Cita bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pedoman strategis yang menghubungkan visi nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan bahwa Asta Cita diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD kabupaten, yang kemudian diturunkan pada rencana pembangunan kecamatan. Di Kairatu, fokusnya adalah penguatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur dasar, serta program ketahanan pangan. Prinsip Asta Cita dijadikan indikator dalam penyusunan prioritas anggaran. Tantangan dalam implementasi Asta Cita di tingkat kecamatan meliputi keterbatasan fiskal daerah dan kapasitas teknis aparatur kecamatan. Namun, setiap program pembangunan tetap mengacu pada delapan poin utama Asta Cita, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Di tingkat kecamatan, prinsip Asta Cita dijabarkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Prinsip-prinsip seperti pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesehatan masyarakat diintegrasikan ke dalam usulan masyarakat. Dengan demikian, implementasi Asta Cita selalu dimulai dari bawah, sesuai kebutuhan riil masyarakat Kairatu. Masyarakat, meski tidak selalu menyebutnya dengan istilah Asta Cita, merasakan manfaatnya melalui pembangunan jalan penghubung antar-desa, peningkatan pelayanan puskesmas, dan dukungan terhadap UMKM lokal. Aparatur kecamatan memiliki peran sebagai mediator, melakukan pendampingan, monitoring, serta menyusun laporan realisasi program pembangunan, agar program yang turun dari kabupaten sesuai dengan Asta Cita dapat berjalan efektif. Koordinasi antara kecamatan dan Bappeda kabupaten dilakukan secara rutin melalui rapat teknis dan laporan bulanan, sehingga implementasi Asta Cita lebih kontekstual sesuai kondisi Kairatu. Menurut pegawai kantor kecamatan, prinsip Asta Cita yang paling dominan diterapkan adalah pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik, sementara pemberdayaan ekonomi lokal melalui koperasi dan UMKM mulai berkembang namun belum sekuat infrastruktur dan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis tematik terhadap wawancara di atas, hasil penelitian dapat disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis Tematik pada Indikator Implementasi Prinsip-Prinsip Asta Cita Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Tema	Hasil Penelitian
1	Integrasi Asta Cita dalam Perencanaan Daerah	Asta Cita telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, hingga turunan di tingkat kecamatan.
2	Tantangan Struktural	Keterbatasan fiskal daerah dan kapasitas teknis aparatur kecamatan. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya cakupan program pembangunan, meskipun arah kebijakan tetap berpedoman pada Asta Cita. Implementasi tidak selalu maksimal karena adanya kendala sumber daya.
3	Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	Implementasi Asta Cita di Kairatu banyak dilakukan melalui Musrenbang. Prinsip-prinsip seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kesehatan masyarakat muncul dari aspirasi warga.

4	Manfaat Nyata bagi Masyarakat	Walaupun masyarakat tidak secara eksplisit mengenal istilah Asta Cita, mereka merasakan dampak dari pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan dukungan UMKM. Hal ini memperlihatkan bahwa Asta Cita berhasil diterjemahkan menjadi program konkret yang dirasakan langsung oleh warga.
5	Peran Aparatur Kecamatan sebagai Mediator	Pegawai kecamatan menekankan peran mereka sebagai penghubung (mediator) antara kebijakan kabupaten dan kebutuhan masyarakat desa. Mereka memastikan program pembangunan sesuai dengan prinsip Asta Cita sekaligus relevan dengan konteks lokal. Aparatur juga melakukan monitoring dan pelaporan agar program berjalan sesuai arah kebijakan.
6	Koordinasi antara Bappeda dan Kecamatan	Melalui rapat teknis dan laporan rutin, implementasi Asta Cita di Kairatu dapat terjaga konsistensinya. Koordinasi ini memperlihatkan adanya hubungan hierarkis sekaligus kolaboratif dalam tata kelola pembangunan daerah.
7	Fokus Dominan pada Infrastruktur dan Layanan Publik	Implementasi Asta Cita di Kairatu lebih dominan pada pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih) serta peningkatan kualitas pelayanan publik (kesehatan dan administrasi). Sementara itu, aspek lain seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan koperasi mulai berkembang namun belum sekuat infrastruktur dan pelayanan publik.

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

Kebijakan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Berbasis Bukti (Evidence-Based), Baik Dari Sisi Perencanaan, Pelaksanaan, Maupun Hasil Pembangunan

Kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan berbasis bukti (evidence-based) merupakan pendekatan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang didasarkan pada data, informasi, serta fakta empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Kairatu, pendekatan ini berarti bahwa setiap program pembangunan dirancang dengan mengacu pada hasil kajian kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi lokal yang terukur, bukan sekadar asumsi atau kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan di Kairatu didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik, laporan sektoral, serta hasil Musrenbang. Setiap program yang diusulkan harus memiliki data pendukung dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Kairatu. Dalam pelaksanaan program, prinsip berbasis bukti tetap digunakan melalui indikator kinerja sebagai acuan, misalnya untuk program kesehatan yang mengacu pada data stunting dan angka kematian ibu-anak.

Pegawai Kantor Kecamatan Kairatu menambahkan bahwa penyusunan program pembangunan selalu menggunakan hasil pendataan dari desa, laporan statistik kecamatan, serta usulan prioritas warga dalam Musrenbang. Hal ini memastikan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi berbasis bukti nyata. Hasil pembangunan dapat diukur melalui indikator konkret seperti berkurangnya keluhan masyarakat, meningkatnya akses infrastruktur dasar, dan pertumbuhan UMKM setelah program pemberdayaan dijalankan. Aparatur kecamatan memiliki

peran penting dalam mengumpulkan dan memvalidasi data dari desa, baik mengenai jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, maupun masalah sosial, sehingga bukti yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar program pembangunan.

Meskipun demikian, implementasi pembangunan berbasis bukti di Kairatu masih menghadapi kendala, terutama terkait kualitas dan kelengkapan data dari desa. Beberapa data perlu diverifikasi ulang agar program tidak salah sasaran. Secara umum, sebagian besar program di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sudah berbasis bukti, meskipun beberapa program masih dipengaruhi faktor politis. Tren saat ini menunjukkan peningkatan penggunaan data yang kuat dalam setiap kebijakan pembangunan.

Berdasarkan analisis tematik terhadap wawancara, hasil penelitian dapat disajikan dalam **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Analisis Tematik pada Indikator Kebijakan Pembangunan Daerah di Kecamatan Berbasis Bukti (Evidence-Based), baik dari Sisi Perencanaan, Pelaksanaan, maupun Hasil Pembangunan

No	Tema	Hasil Penelitian
1	Perencanaan Berbasis Data Statistik dan Aspirasi Lokal	Perencanaan pembangunan disusun dengan mengacu pada data BPS, laporan sektoral, dan hasil Musrenbang.
2	Pelaksanaan Program Menggunakan Indikator Kinerja	Indikator kinerja digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program, khususnya di bidang kesehatan.
3	Pendekatan Lokal: Data dari Desa sebagai Dasar Keputusan	Implementasi evidence-based di Kairatu bersifat lokal dan kontekstual, tidak hanya mengikuti kebijakan kabupaten secara top-down, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata desa.
4	Pengukuran Hasil Pembangunan dengan Bukti Nyata	Hasil pembangunan diukur dengan indikator konkret, seperti peningkatan akses jalan, pertumbuhan UMKM, dan berkurangnya keluhan masyarakat.
5	Peran Aparatur dalam Pengumpulan dan Validasi Data	Pegawai kecamatan memiliki peran penting sebagai penyedia data dasar. Peran ini menjadikan aparatur bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga aktor kunci dalam memastikan ketersediaan bukti untuk mendukung pembangunan berbasis data.

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

Keterkaitan Antara Potensi Lokal yang dimiliki Kecamatan Kairatu dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Asta Cita

Keterkaitan antara potensi lokal yang dimiliki Kecamatan Kairatu dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka Asta Cita mencerminkan hubungan strategis antara sumber daya unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, dengan delapan prioritas pembangunan nasional yang dijadikan pedoman daerah. Potensi lokal ini tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asta Cita berperan sebagai kerangka yang mengarahkan pemanfaatan potensi lokal agar dilakukan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sehingga memperkuat

kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan pembangunan di Kairatu menjadi lebih relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan bahwa potensi Kairatu di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan dimasukkan dalam RPJMD sebagai fokus pembangunan ekonomi daerah. Arah kebijakan dalam kerangka Asta Cita diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta membuka akses pasar bagi produk lokal. Data produksi cengkeh dan pala menjadi dasar pengembangan program agribisnis sehingga arah kebijakan disesuaikan dengan kekuatan lokal.

Pegawai Kantor Kecamatan Kairatu menambahkan bahwa potensi lokal diintegrasikan ke dalam usulan pembangunan melalui Musrenbang kecamatan. Aspirasi masyarakat terkait peningkatan produksi pertanian, perikanan tangkap, dan UMKM berbasis hasil bumi disinkronkan dengan kerangka Asta Cita, khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja. Contoh nyata adalah program pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pendampingan UMKM berbasis kelapa serta cengkeh, yang merupakan wujud penerapan Asta Cita melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aparatur kecamatan berperan sebagai penghubung antara potensi desa dan arah kebijakan makro, memastikan kebijakan pembangunan kabupaten sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Namun, implementasi potensi lokal masih menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Meskipun hampir semua program pembangunan diarahkan untuk mendukung sektor unggulan daerah, beberapa prioritas kabupaten lebih dominan sehingga potensi lokal belum sepenuhnya dioptimalkan. Tren saat ini menunjukkan bahwa pembangunan mulai diarahkan untuk memperkuat basis lokal sesuai semangat Asta Cita.

Berdasarkan analisis tematik wawancara, hasil penelitian disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Analisis Tematik pada Indikator Keterkaitan Potensi Lokal Kecamatan Kairatu dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Asta Cita

No	Tema	Hasil Penelitian
1	Potensi Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan sebagai Basis Pembangunan	Potensi utama Kairatu adalah sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh, pala, kelapa). Potensi ini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah. Asta Cita diterjemahkan secara kontekstual, memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan agribisnis berbasis sumber daya lokal.
2	Integrasi Potensi Lokal dalam Perencanaan melalui Musrenbang	Potensi lokal dimasukkan ke dalam agenda pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3	Program Konkret yang Berbasis Potensi Lokal	Terdapat program nyata dari potensi lokal, seperti pelatihan pengolahan hasil perikanan, pengembangan UMKM berbasis kelapa dan cengkeh, serta pendampingan petani. Program-program ini mencerminkan implementasi Asta Cita melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4	Peran Aparatur sebagai	Aparatur mengidentifikasi potensi desa dan menyampaikannya

	Jembatan Potensi Lokal dan Kebijakan Makro	ke tingkat kabupaten, menjadi penghubung antara realitas lokal dan arah kebijakan makro daerah.
5	Hambatan Optimalisasi Potensi Lokal	Kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Produk lokal menghadapi hambatan distribusi karena jalan dan konektivitas wilayah belum optimal, sehingga keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan sistem pemasaran.

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Selaras Dengan Prioritas Asta Cita Di Kecamatan Kairatu

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas Asta Cita di Kecamatan Kairatu mencakup kondisi, sumber daya, dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan pembangunan sesuai delapan prioritas nasional. Faktor pendukung antara lain komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan potensi lokal, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, keterbatasan dana, serta tantangan koordinasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Pemahaman terhadap kedua aspek ini memungkinkan implementasi kebijakan pembangunan diarahkan lebih efektif, sehingga program-program yang selaras dengan Asta Cita dapat diwujudkan secara optimal.

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sebagai faktor pendukung utama. Dukungan data dari Bappeda juga membantu agar perencanaan lebih terarah. Selain itu, potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perikanan, menjadi modal dasar pelaksanaan program pembangunan. Sinergi antara kecamatan dan desa dalam menyusun prioritas juga mempercepat proses implementasi. Aparatur kecamatan berperan sebagai penguat kelembagaan dengan koordinasi baik antar perangkat kecamatan dan dukungan kabupaten, meskipun kapasitas teknis aparatur masih perlu ditingkatkan.

Sebaliknya, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan anggaran daerah, sehingga beberapa program tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Infrastruktur jalan yang belum memadai menghambat distribusi hasil produksi masyarakat. Aspek sosial juga menjadi kendala, di mana kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan program masih rendah. Kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat, membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar potensi lokal dapat dikelola secara optimal. Secara umum, faktor pendukung utama mencakup potensi lokal, komitmen pemerintah, dan partisipasi masyarakat, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas SDM, dan koordinasi antar-lembaga.

Berdasarkan analisis tematik terhadap wawancara tersebut, hasil penelitian disajikan dalam **Tabel 4** berikut:

Tabel 4. Analisis Tematik pada Indikator Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Selaras dengan Prioritas Asta Cita di Kecamatan Kairatu

No	Tema	Hasil Penelitian
1	Komitmen Pemerintah Daerah dan Sinergi Kelembagaan	Adanya komitmen politik untuk menjadikan Asta Cita sebagai pedoman pembangunan.
2	Potensi Sumber Daya Alam yang Melimpah	Potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan disebut sebagai modal dasar pembangunan.
3	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	Pendekatan partisipatif memperkuat legitimasi kebijakan berbasis Asta Cita.
4	Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Fiskal	Banyak program tidak dapat dijalankan sepenuhnya karena kapasitas fiskal daerah yang lemah.
5	Infrastruktur dan Akses Pasar yang Terbatas	Jalan dan sarana distribusi yang belum memadai membuat produk lokal sulit bersaing.
6	Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya penguasaan teknologi oleh petani, nelayan, maupun aparatur.
7	Keterbatasan Partisipasi Sosial dalam Implementasi	Masyarakat sering hanya aktif di tahap perencanaan, tetapi kurang terlibat dalam pemeliharaan program.

Sumber: Hasil Wawancara, 2025

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Asta Cita di Kecamatan Kairatu berlangsung melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang bersifat berjenjang dan partisipatif. Integrasi Asta Cita ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD kabupaten, kemudian diterjemahkan ke tingkat kecamatan melalui Musrenbang, mencerminkan upaya penyelarasan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks Kairatu, implementasi ini tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berfungsi sebagai pedoman substantif dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama pada penguatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa Asta Cita berperan sebagai kerangka strategis yang menjembatani arah kebijakan makro dengan realitas sosial dan geografis wilayah kecamatan.

Pendekatan pembangunan berbasis bukti menjadi karakter penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kecamatan Kairatu. Perencanaan dan pelaksanaan program didasarkan pada data statistik, laporan sektoral, serta hasil pendataan desa yang dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi kebijakan karena keputusan pembangunan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan jangka pendek, melainkan berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat. Aparatur kecamatan memiliki peran sentral sebagai pengumpul, pengelola, dan penghubung data dari desa ke tingkat kabupaten, sehingga pembangunan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Meskipun masih terdapat kendala terkait kualitas dan konsistensi data, kecenderungan penggunaan bukti empiris menunjukkan adanya pergeseran tata kelola pembangunan menuju praktik yang lebih rasional, transparan, dan akuntabel.

Keterkaitan antara potensi lokal dan arah kebijakan pembangunan dalam kerangka Asta Cita memperlihatkan bahwa pembangunan di Kairatu bersifat kontekstual dan berbasis sumber

daya wilayah. Potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik melalui penguatan ketahanan pangan maupun pemberdayaan UMKM berbasis hasil lokal. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkelindan. Komitmen pemerintah, sinergi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting keberhasilan implementasi, sementara keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan anggaran daerah menjadi tantangan utama. Dengan demikian, implementasi Asta Cita di Kecamatan Kairatu dapat dipahami sebagai proses yang berjalan secara adaptif dan bertahap, di mana keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal dan mengatasi kendala struktural yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Asta Cita melalui integrasi kebijakan nasional ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Asta Cita tidak hanya dijadikan sebagai acuan normatif dalam dokumen perencanaan daerah, tetapi juga diterjemahkan secara kontekstual melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbang. Pendekatan pembangunan berbasis bukti memperkuat relevansi kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat, sementara pemanfaatan potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadikan arah pembangunan lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, yang memengaruhi optimalisasi hasil pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya dalam pengelolaan data dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Selain itu, peningkatan kualitas dan keterpaduan data desa perlu menjadi perhatian utama agar kebijakan yang dirumuskan semakin tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung dan membuka akses pasar bagi produk lokal, sehingga potensi ekonomi masyarakat Kairatu dapat berkembang secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat perlu terus didorong tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program pembangunan, agar prinsip Asta Cita benar-benar terwujud dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwilita, H., Sari, P. B., & Sasmita, P. K. A. (2025). Mapping of Village Potential and The Application of Audit In Red and White Cooperatives: A Literature Review. *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 2819–2825.
- Evinita, L. L., Tangkau, J. E. M., Pesak, P. J., & Cahyono, S. (2025). Policy Framework to Improve MSME Competitiveness and Financial Performance with Indonesia's Asta Cita Vision Goals. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(12), 692.
- Faried, A. I., Maisyarah, R., Sari, M. M., & Fitriana, Y. (2025). Regulatory Policy for Village Cooperatives: The KDKMP Model in Regional Development Planning. *Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies*, 1, 300–305.

- Firmanto, T. (2025). THE ROLE OF LOCAL WISDOM" UMA LENGGE" IN ACHIEVING FOOD SOVEREIGNTY AND ASTA CITA IN THE INDIGENOUS COMMUNITY OF NORTH MARIA, BIMA. *Lex Localis*, 23(11), 698–708.
- Lestari, N. W. F. A., Suwandi, S., Turini, T., Akbari, S., Gitama, G. N. D. P., & Akbari, S. (2025). DIGITALIZATION OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN CIREBON CITY THROUGH POS APPLICATION INNOVATION IN SUPPORTING ASTA CITA. *Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 1(2), 329–340.
- Matsuda, A., Pasha, J. A., & Arbay, E. A. (2025). The Philosophy of Customs and Tradition of the Baduy Tribe and Their Contribution to the Sustainable Development Goal (SDG 11) and the Indonesia Presidential Asta Cita Policy. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(4), 5679.
- Ramompas, Y., Thimotius, R., & Huru, D. E. R. (2025). Strategy and Implementation of Poverty Alleviation through New and Renewable Energy in East Sumba. *Jurnal Mebis*, 10(2), 156–176.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58–69.
- Sakir, A. R., & Arni, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility PT Pelindo IV (Persero) pada Alokasi Bantuan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 123–133.
- Sakir, A. R., & Silawane, N. N. (2025). Analisis Komprehensif Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Dana Desa di Indonesia Menurut Model Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi Merilee S. Grindle. *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 12–26.
- Salamanca Osorio, J. F. (2023). Las Estrategias de Desarrollo Regional desde la percepción de actores regionales. *Polis (Santiago)*, 22(64), 299–344.
- Satoto, S., Nuriyatman, E., Mushawirya, R., Mujib, M. M., & Haq, M. I. (2024). Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity. *Jambe Law Journal*, 7(2).
- Selanno, D. M., Sahetapy, P., & Selanno, H. (2025). Pengaruh Fungsi Anggaran dan Kinerja Panitia Kerja (Panja) terhadap Efektivitas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2834–2844.
- Selanno, H., Rahawarin, M. A., & Sakir, A. R. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 543–564.
- Silawane, D., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Analisis Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7090–7104.
- Subrata, A. C., Ibdal, I., Sudarmini, S., Suharto, T. E., Putranti, D., Rahmawan, J., Aska, G. N. U., & Hidayah, L. (2025). Empowerment of Cassava Leaf Silkworm Cultivation Groups Through Processing of Ceara Rubber Tree (*Manihot Glaziovii*) as Local Food Potential. *Indonesia Berdaya*, 6(3), 727–736.
- Wahyuni, T., Amarullah, R., & Sartika, D. (2024). Estafet reformasi birokrasi dalam mendukung asta cita. *Suara Analisis Kebijakan*, 1(2).
- Waisapy, J., Selanno, H., & Cahyani, I. (2025). PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN BAGI STAF KELURAHAN UNTUK EFISIENSI PELAYANAN MASYARAKAT DI NEGERI PASSO KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Yusri, M., & Hajar, S. (2025). *Planning for Sustainable Tourism Development based on Local Wisdom in Samosir Island, Indonesia: Challenges and Opportunities*.